

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
MENURUT PENGELUARAN

2017-2021



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
MENURUT PENGELUARAN

2017-2021



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021**

ISSN :

Nomor Publikasi : 71040.2203

Katalog BPS : 9302023.7104

Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah halaman : xii + 62 halaman

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Dicetak Oleh :

CV. Bahu Bahtera Indah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :

Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

Penyunting :

Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

Suryo Refli Ranto, SST.

Penulis :

Epsilon Diana Putri, S.Tr.Stat

Pengolah Data :

Epsilon Diana Putri, S.Tr.Stat

Gambar Kulit dan Infografis :

Adeantiko Riza Febiunca, S.Si

<https://talaudkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini merupakan publikasi yang menyajikan data PDRB Tahun Dasar Baru (2010=100), dan sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Melonguane, April 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,


Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xi
I. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Pengertian SNA 2008.....	6
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT).....	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT).....	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor - Impor	21
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2017 -2021.....	23
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	25
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran.....	32
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 2017-2021.....	45
4.1 PDRB (Nominal)	47
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhrit Terhadap PDRB	47
4.3 <i>Average Propensity To Consume (APC)</i> dan <i>Average Propensity To Save (APS)</i>	48
4.4 <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	49
V. PENUTUP	51
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jenis Belanja Pemerintah dan Deflatornya	16
Tabel 2	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	26
Tabel 3	PDRB atas dasar harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	27
Tabel 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	29
Tabel 5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	31
Tabel 6	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	32
Tabel 7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga, Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021	33
Tabel 8	Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021	34
Tabel 9	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021	35
Tabel 10	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021	36
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021	37
Tabel 12	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021	38
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	40
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021	41

Tabel 15	Perkembangan Ekspor Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	42
Tabel 16	Perkembangan Impor Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	43
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	47
Tabel 18	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	48
Tabel 19	<i>Average Propensity to Consume</i> dan <i>Average Propensity to Save</i> Tahun 2017-2021	49
Tabel 20	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> , Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017-2021	50

<https://talaudkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	26
Gambar 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	28
Gambar 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	28
Gambar 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	30
Gambar 5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	31

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021	57
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021	58
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021	59
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021	60
Lampiran 5.	Indeks Implisit Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Angka agregat penting yang dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Meski sempat meningkat pada 2017, pertumbuhan di 4 tahun berikutnya justru mengalami perlambatan, hingga puncaknya melambat signifikan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19. Namun pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 telah mengalami percepatan kembali menandai telah bangkitnya perekonomian dari pandemic COVID-19. Sedangkan untuk PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud atas dasar harga berlaku pada periode tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan secara signifikan, yakni sebesar 1.919,78 miliar Rupiah pada tahun 2017 menjadi 2.421,88 miliar Rupiah pada tahun 2021. Dimana, kontribusi terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang selama periode 2017-2021, dengan kontribusi selalu diatas 66 persen.

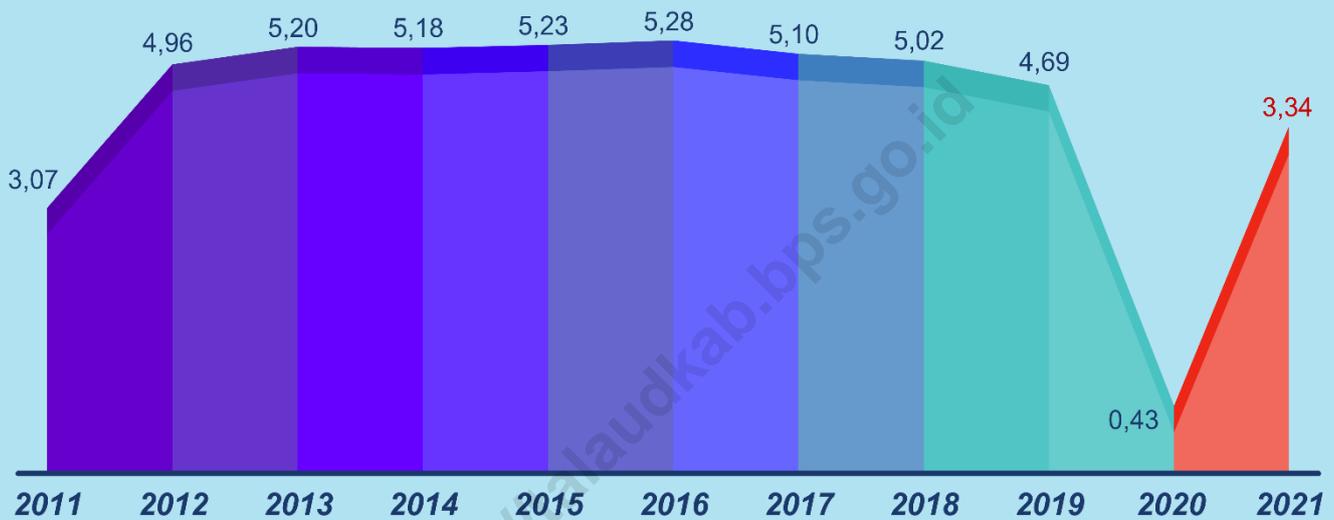
<https://talaudkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN 01

PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2011 - 2021



PKRT

adalah komponen dengan nilai kontribusi terbesar

66,5%

PK-LNPRT

adalah komponen dengan pertumbuhan tertinggi

21,3%



PDRB Pengeluaran menggambarkan hasil akhir dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah

<https://talaudkab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat.

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi sama besar dengan PDRB Pengeluaran, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik regional bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antarwilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau

mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*).Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*).CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

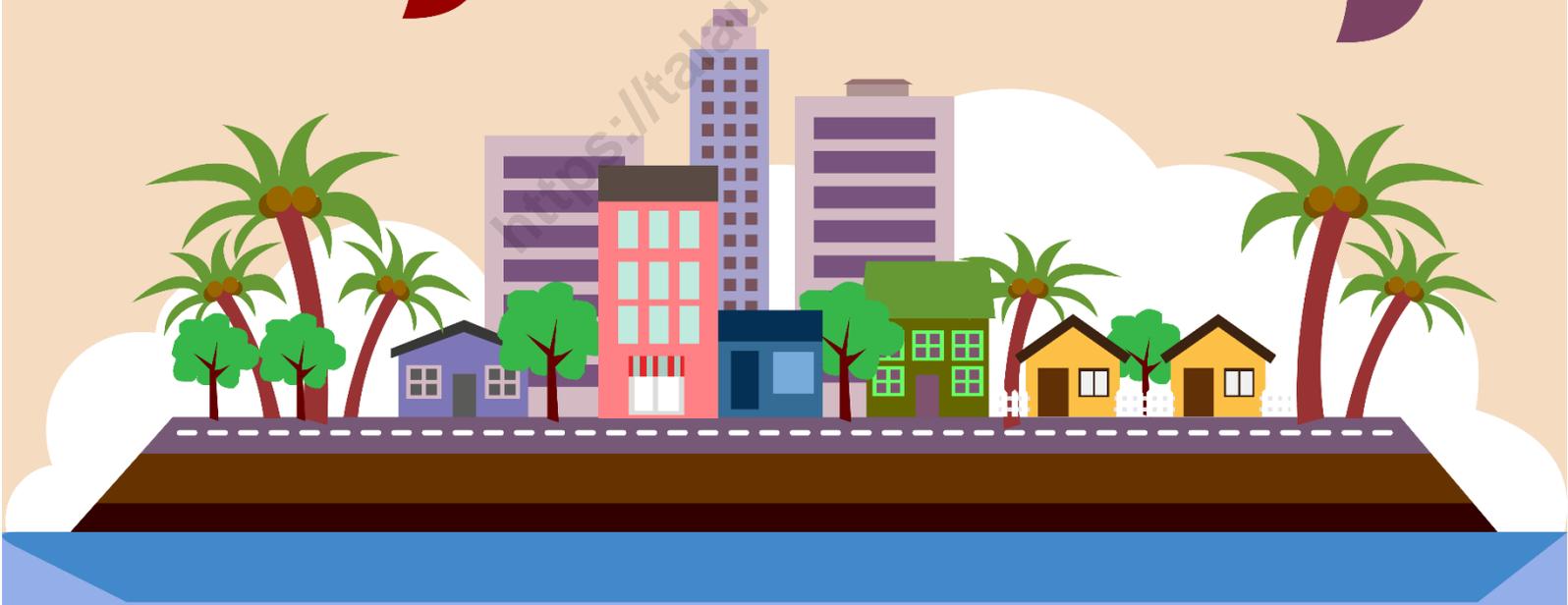
<https://talaudkab.bps.go.id>



METODE ESTIMASI & SUMBER DATA

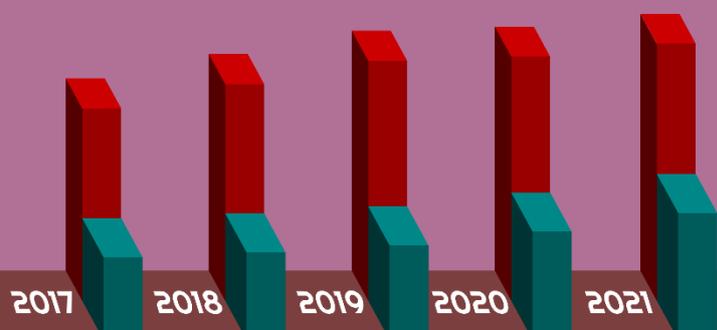
02

Nilai Komponen PDRB Pengeluaran tahun 2021,urut dari yang terbesar



Perbandingan Ekspor dan Impor, 2017-2021

● Impor ● Ekspor



Net Ekspor yang negatif, mengindikasikan bahwa masyarakat Talaud masih bergantung pada daerah lain

<https://talaudkab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁴. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

⁴Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS

- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun

moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktik, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS

- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\text{PK-P Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P Atas Dasar Harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P Atas Dasar Harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Tabel 1. Jenis Belanja Pemerintah dan Deflatornya

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metode Langsung:

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB Atas Dasar Harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $\text{PMTB Atas Dasar Harga Berlaku} = \frac{\text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio}}{\text{PMTB}}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $\text{PMTB Atas Dasar Harga Konstan (t)} = \text{PMTB Atas Dasar Harga Konstan (t-1)} \times \text{Indeks Produksi (t)}$

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi

pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;

8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v **Metode Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI Atas Dasar Harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI Atas Dasar Harga Konstan = PI Atas Dasar Harga Berlaku / IHPB

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI Atas Dasar Harga Konstan = Inventori (t) Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t)-
Inventori (t-1) Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI Atas Dasar Harga Berlaku = PI Atas Dasar Harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impur dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut

memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar-residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

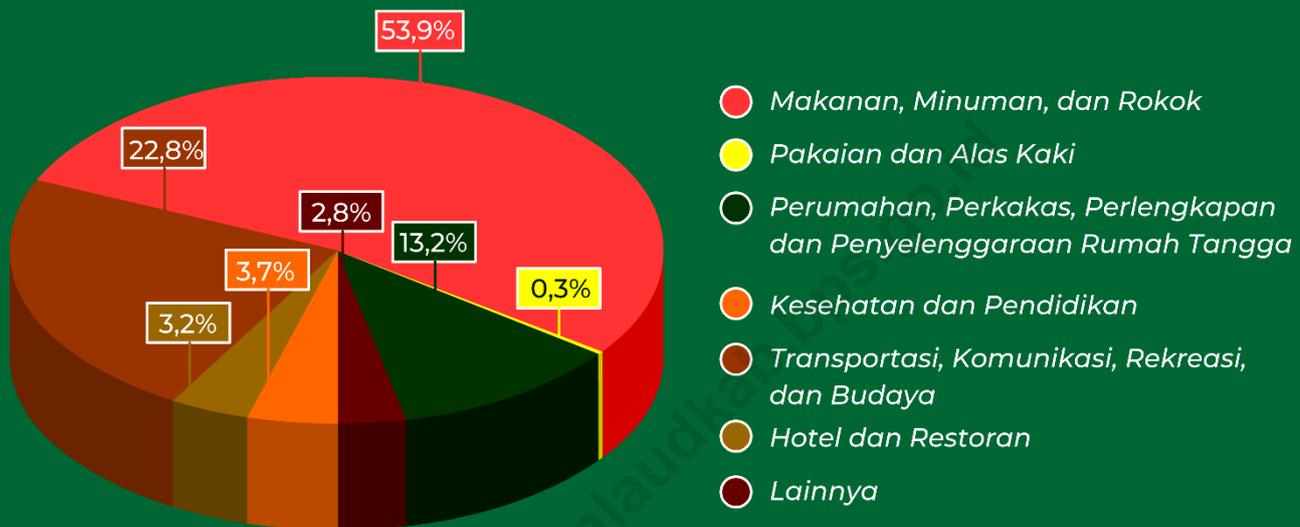
iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

TINJAUAN PEREKONOMIAN



STRUKTUR KOMPONEN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA, 2021



Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB, 2017-2021 (miliar rupiah)



Mayoritas Masyarakat Kepulauan Talaud masih menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primer

<https://talaudkab.bps.go.id>

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2021 meningkat sebesar 6,85 persen, yakni dari 2.266,56 miliar Rupiah pada Tahun 2020 menjadi 2.421,88 miliar Rupiah. Sedangkan peningkatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 lebih kecil karena menggunakan harga tahun dasar 2010, yakni dari 1.611,74 miliar Rupiah (2010=100) pada Tahun 2020 menjadi 1.665,60 miliar Rupiah (2010=100) pada Tahun 2021, atau meningkat sebesar 3,34 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2021 sebesar 3,34 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan setelah pada tahun 2020 yang tumbuh melambat sebesar 0,43 persen. Peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2021 tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*), dimana secara umum perekonomian telah beranjak pulih dari pandemi COVID-19.

Dari sisi produksi, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, berbeda dari tahun sebelumnya terdapat sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, di mana empat lapangan usaha mengalami pertumbuhan kurang dari -4 persen. Begitu pula dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan positif ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud utamanya diakibatkan oleh meningkatnya kategori Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT).

Pada periode tahun 2017 - 2021 PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan, yakni dari sebesar 1.919,78 miliar Rupiah pada tahun 2017 hingga mencapai 2.421,88 milyar Rupiah pada tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari Tabel 2 dan Gambar 1 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021**

(Miliar Rp)

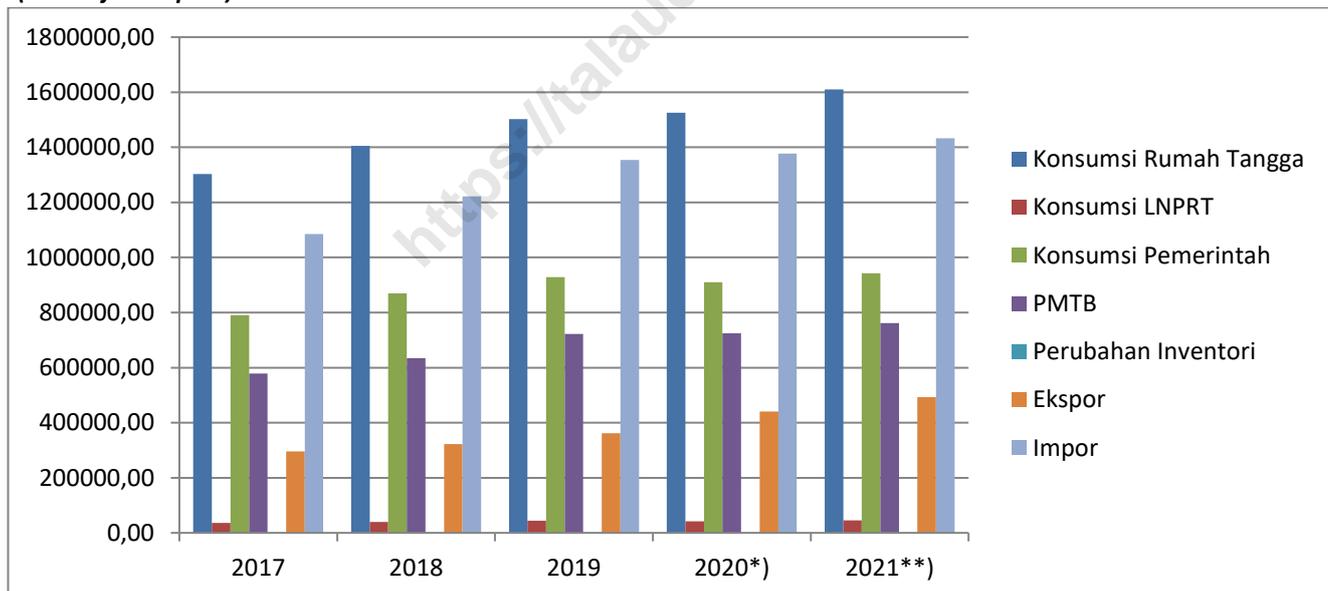
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.302,53	1.404,62	1.502,69	1.525,27	1.610,15
2. Konsumsi LNPRT	36,31	39,71	44,73	42,47	45,65
3. Konsumsi Pemerintah	790,92	869,18	928,88	910,25	943,05
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	578,09	633,93	722,79	724,52	762,30
5. Perubahan Inventori	0,97	0,91	0,95	1,02	1,07
6. Ekspor	295,58	322,82	361,88	440,75	492,99
7. Impor	1.084,62	1.222,22	1.354,19	1.377,72	1.433,34
PDRB	1.919,78	2.048,96	2.207,73	2.266,56	2.421,88

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

**Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 - 2021**

(dalam juta rupiah)



Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selain dinilai Atas Dasar Harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau Atas Dasar Harga dari berbagai jenis produk yang dinilai dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode 2016-2020 dapat dilihat dari Tabel 3 dan Gambar 2 berikut ini:

Tabel 3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	977,33	1.025,35	1.072,83	1.078,60	1.117,83
2. Konsumsi LNPRT	27,62	28,91	30,98	30,95	32,96
3. Konsumsi Pemerintah	578,95	607,36	630,90	608,86	616,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	451,14	468,11	497,62	470,77	485,93
5. Perubahan Inventori	0,80	0,75	0,76	0,80	0,83
6. Ekspor	301,44	315,81	336,85	401,77	419,61
7. Impor	877,64	913,40	965,15	980,00	1.008,49
PDRB	1.459,64	1.532,89	1.604,81	1.611,74	1.665,60

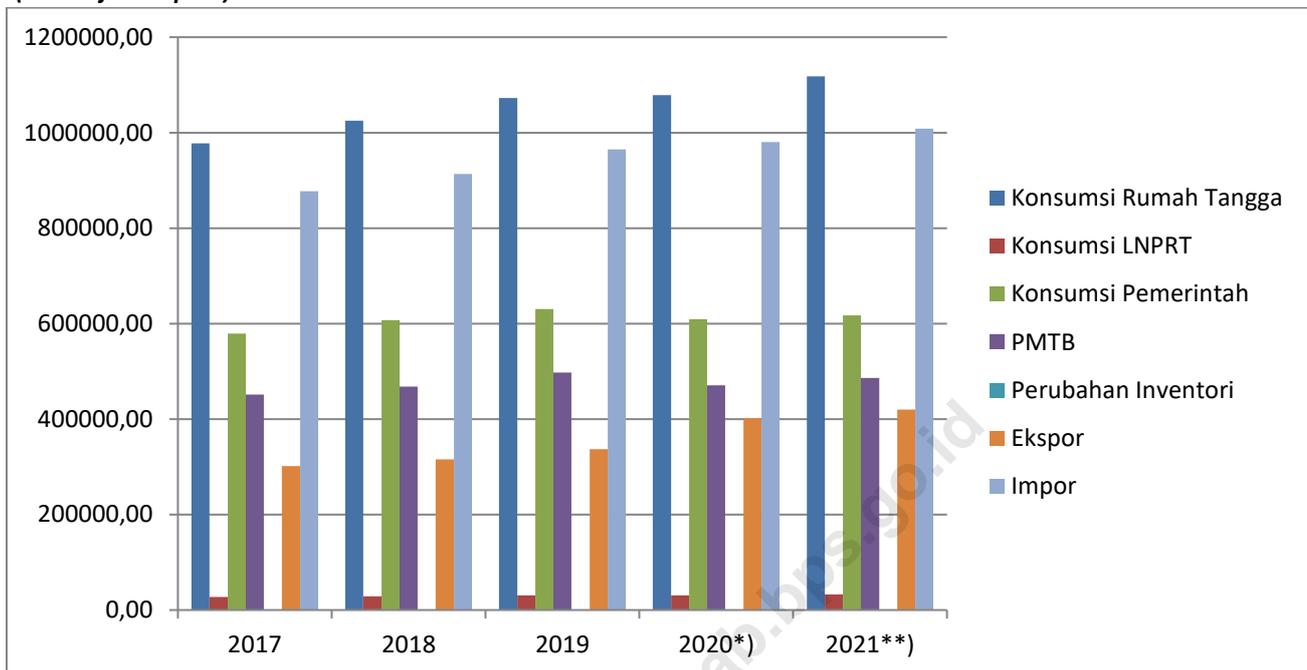
Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 3, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kepulauan Talaud terus meningkat, yakni dari sebesar 1.459,64 miliar Rupiah pada tahun 2017 hingga mencapai 1.665,60 miliar Rupiah pada tahun 2021.

Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017 - 2021

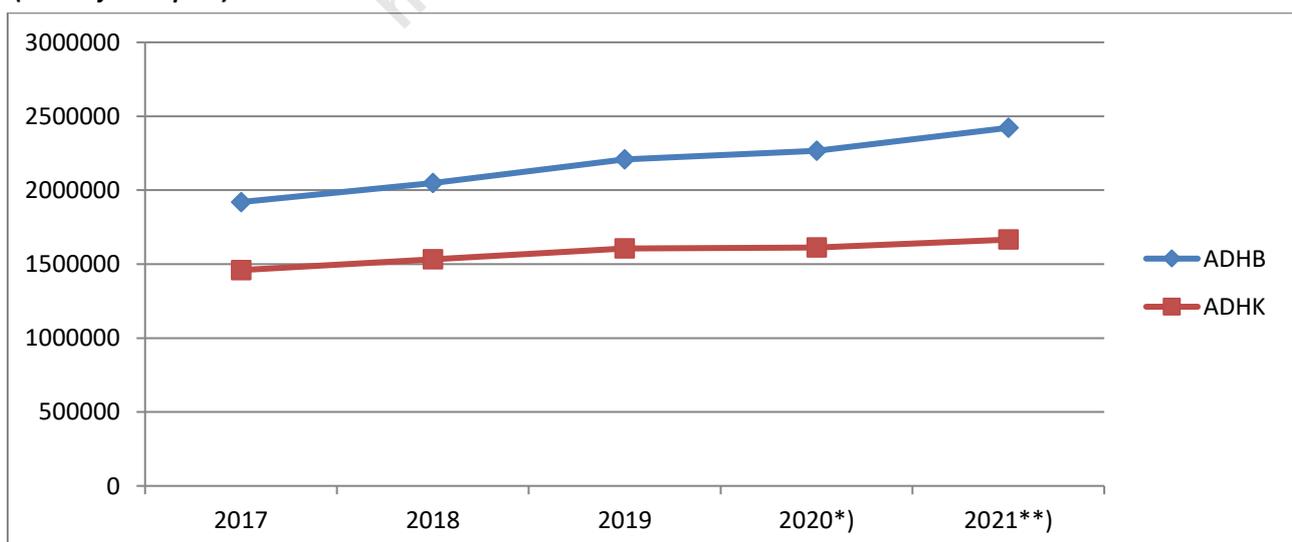
(dalam juta rupiah)



Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Gambar 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021

(dalam juta rupiah)



Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari Gambar 3, terlihat bahwa nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang mengalami peningkatan sedangkan pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,85	68,55	68,06	67,29	66,48
2. Konsumsi LNPRT	1,89	1,94	2,03	1,87	1,88
3. Konsumsi Pemerintah	41,20	42,42	42,07	40,16	38,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,11	30,94	32,74	31,97	31,48
5. Perubahan Inventori	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
6. Ekspor	15,40	15,76	16,39	19,45	20,36
7. Impor	56,50	59,65	61,34	60,78	59,18
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

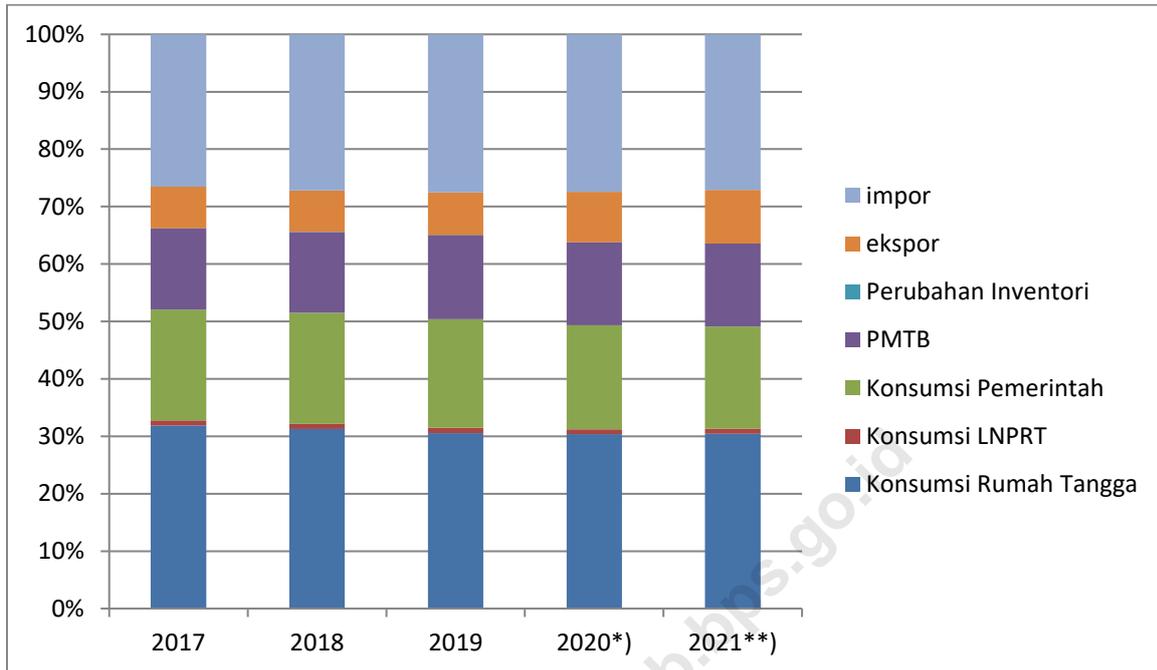
Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari Tabel 4 terlihat bahwa selama periode 2017-2021, PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) dimana kontribusinya sekitar 66 hingga 68 persen. Kategori dengan kontribusi terbesar kedua adalah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pengeluaran dengan *share* sekitar 38 s.d 42 persen. Selain itu, aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 30 s.d 32 persen. Meskipun komponen ekspor berkontribusi kecil, yaitu hanya sekitar 15 s.d 20 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 56 s.d 61 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri.

Gambar 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021



Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada kisaran 38 persen pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cukup besar, meski sempat tumbuh negatif pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi pemerintah pada 2021 kembali tumbuh positif. Di sisi lain, pada tahun 2017-2021 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor lebih tinggi dari ekspor. Selisih nilai ekspor-impor pada periode ini selalu menunjukkan posisi “defisit” atau merugi.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 5, selama periode tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud berfluktuatif, yakni melambat dari 5,10 persen pada tahun 2017 ke 4,69 persen pada tahun 2019, kemudian melambat signifikan menjadi 0,43 persen pada tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19, namun akhirnya mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 3,34 persen. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kemudian dari Gambar 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

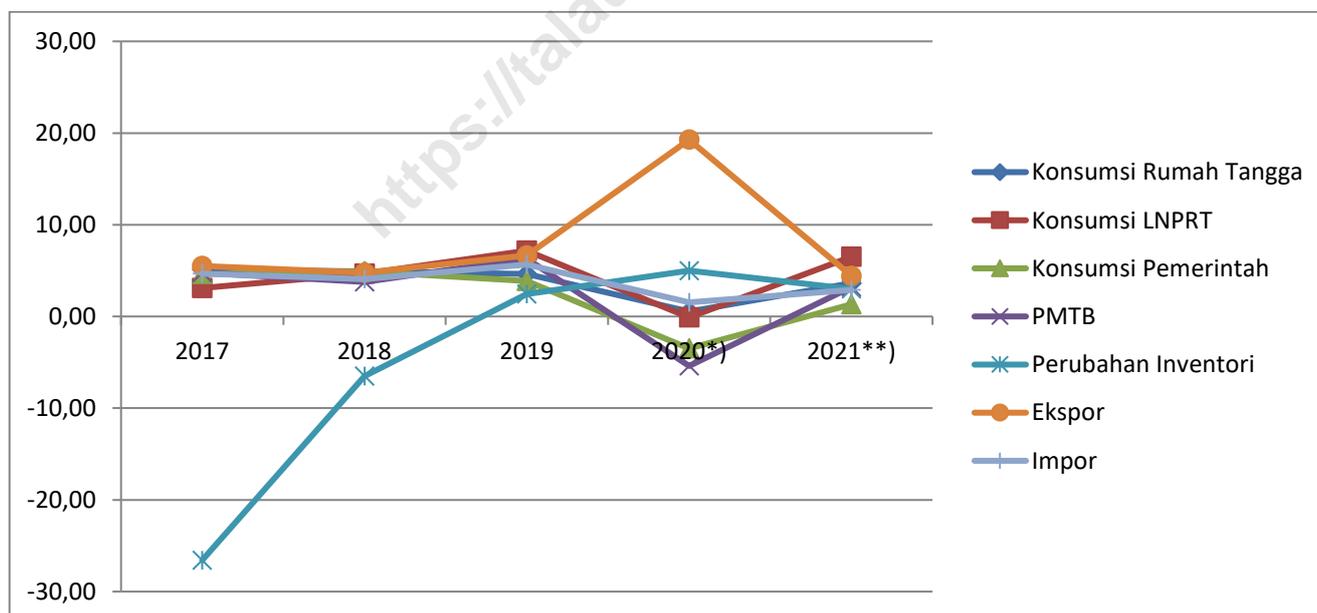
Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,11	4,91	4,63	0,54	3,64
2. Konsumsi LNPRT	3,11	4,67	7,17	-0,10	6,50
3. Konsumsi Pemerintah	4,65	4,91	3,88	-3,49	1,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,76	3,76	6,30	-5,40	3,22
5. Perubahan Inventori	-26,58	-6,52	2,44	4,99	3,00
6. Ekspor	5,49	4,77	6,66	19,27	4,44
7. Impor	4,66	4,07	5,67	1,54	2,91
PDRB	5,10	5,02	4,69	0,43	3,34

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Gambar 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021



Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Indeks implisit⁵ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik

⁵ Indeks perkembangan

yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari Tabel 6 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2017 – 2021, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 6. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	133,27	136,99	140,07	141,41	144,04
2. Konsumsi LNPRT	131,49	137,40	144,39	137,23	138,52
3. Konsumsi Pemerintah	136,61	143,11	147,23	149,50	152,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	128,14	135,42	145,25	153,90	156,87
5. Perubahan Inventori	121,10	121,53	124,34	127,02	129,49
6. Ekspor	98,06	102,22	107,43	109,70	117,49
7. Impor	123,58	133,81	140,31	140,58	142,13
PDRB	131,52	133,67	137,57	140,63	145,41

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2017 – 2021.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud maupun produk

(impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.302,53	1.404,62	1.502,69	1.525,27	1.610,15
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	977,33	1.025,35	1.072,83	1.078,60	1.117,83
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	67,85	68,55	68,06	67,29	66,48
Rata-rata konsumsi per-Kapita					
a. ADHB (Ribu Rp)	14.364	15.334	16.250	16.137	16.952
b. ADHK 2010 (Ribu Rb)	10.778	11.194	11.601	11.411	11.769
Pertumbuhan ⁶					
a. Total konsumsi RT	5,11	4,91	4,63	0,54	3,64
b. Perkapita	4,13	3,86	3,64	-1,64	3,13
Jumlah penduduk(orang)	90.678	91.599	92.475	94.521	94.983

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017 - 2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun secara riil (Atas Dasar Harga Konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

⁶Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Rata-rata konsumsi per kapita dari tahun 2017 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pada tahun 2017, setiap penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud menghabiskan dana sekitar 14,36 juta Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 16,25 juta Rupiah pada tahun 2019. Namun tren kenaikan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2020, dimana konsumsi per kapita turun ke 16,14 juta rupiah. Penurunan konsumsi per kapita pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kemudian pada tahun 2021 tren konsumsi per kapita kembali naik yaitu menjadi 16,95 juta rupiah disebabkan pemulihan perekonomian masyarakat dari pandemi COVID-19. Di sisi lain, konsumsi per kapita secara “riil” juga mengalami tren yang sama.

Setiap perubahan konsumsi per kapita dari tahun 2017 ke 2021 tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021⁷

Kelompok Konsumsi	2017					2018					2019					2020*)					2021**)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	51,90	51,74	52,09	54,05	53,90																				
b. Pakaian dan Alas Kaki	0,30	0,29	0,30	0,28	0,34																				
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,85	13,17	13,19	13,46	13,25																				
d. Kesehatan & Pendidikan	3,06	3,02	3,07	3,52	3,71																				
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	25,90	25,79	25,33	22,84	22,80																				
f. Hotel & Restoran	3,40	3,27	3,32	3,16	3,20																				
g. Lainnya	2,59	2,71	2,70	2,69	2,80																				
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																				

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara rata-rata dari tahun 2017 s.d. 2021, terlihat pada Tabel 8 bahwa konsumsi makanan lebih tinggi daripada konsumsi non makanan. Konsumsi makanan, minuman, dan rokok pada tahun 2017-2021 memiliki kontribusi lebih dari 50 persen terhadap struktur komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orientasi mayoritas masyarakat Kepulauan Talaud dalam bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari.

Apabila ditinjau dari pertumbuhan “riil”nya, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2021 mengalami tumbuh positif di semua subkomponen. Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana terdapat subkomponen yang tumbuh negatif, di antaranya Pakaian dan Alas Kaki -4,08 persen, Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga -0,06 persen, Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya -5,53 persen, Hotel dan Restoran -2,41 persen, dan Lainnya -1,59 persen. Subkomponen yang tumbuh negatif pada tahun 2020 mendapat dampak dari pandemi COVID-19. Namun pada 2021 kembali menjadi tumbuh positif menandakan pulihnya perekonomian masyarakat dan meningkatnya pendapatan yang mengakibatkan daya beli masyarakat kembali meningkat.

Tabel 9. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017-2021

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,84	4,03	4,39	3,92	3,32
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,20	4,99	5,35	-4,08	16,51
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,00	7,95	6,70	-0,06	3,38
d. Kesehatan & Pendidikan	3,61	3,75	4,40	9,63	7,70
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,04	5,34	4,48	-5,53	3,14
f. Hotel & Restoran	3,22	1,84	3,25	-2,41	5,08
g. Lainnya	7,28	7,86	2,74	-1,59	7,05
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,11	4,91	4,63	0,54	3,64

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 10, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi

rumah tangga. Peningkatan harga tertinggi pada periode 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,06 persen.

Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017-2021

	(%)				
Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,84	3,35	3,18	1,34	1,89
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,20	-1,82	6,90	-0,53	8,58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,36	2,43	0,37	3,66	0,48
d. Kesehatan & Pendidikan	2,91	2,53	4,25	5,97	3,34
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,44	1,94	0,56	-3,09	2,15
f. Hotel & Restoran	3,08	1,98	4,91	-0,90	1,90
g. Lainnya	5,13	4,56	3,59	2,70	2,80
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,06	2,79	2,25	0,96	1,86

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Setelah sempat meningkat pada periode tahun 2017 s.d. 2019, total konsumsi LNPRT mengalami penurunan pada tahun 2020 namun meningkat kembali di tahun 2021. Tren yang sama juga dialami oleh laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 yang bergerak dari 3,11 persen pada tahun 2017 menuju 7,17 persen pada tahun 2019, kemudian tumbuh negatif pada tahun 2020 sebesar minus 0,1 persen namun kembali tumbuh positif sebesar 6,50 persen pada tahun 2021. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang

menyebabkan adanya pembatasan untuk berkumpul dan mengadakan kegiatan. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak LNPRRT yang mengurangi aktifitasnya, atau bahkan hingga tidak beroperasi total selama pandemi. Pada tahun 2021 telah melonggarnya pembatasan berkumpul khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga LNPRRT mulai mengadakan kegiatan.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	36,31	39,71	44,73	42,47	45,65
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	27,62	28,90	30,98	30,95	32,96
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,89	1,94	2,03	1,87	1,88
Pertumbuhan(ADHK 2010)	3,11	4,67	7,17	-0,10	6,50

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	790,92	869,18	928,88	910,25	943,05
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	578,95	607,36	630,90	608,86	616,93
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	41,20	42,42	42,07	40,16	38,94
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	8.722	9.489	10.045	9.630	9.929
b. ADHK 2010	6.385	6.631	6.822	6.442	6.495
Pertumbuhan ⁸					
a. Total konsumsi pemerintah	4,65	4,91	3,88	-3,49	1,33
b. Konsumsi perkapita	3,68	3,85	2,89	-5,58	0,83
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	90.678	91.599	92.475	94.521	94.983

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara umum, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Setelah pada periode tahun 2016 s.d. 2019 mengalami peningkatan, komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2020 namun kembali meningkat di tahun 2021. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga mengalami fluktuasi yang sejalan. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 dimana anggaran pemerintah daerah dialihkan sebagian besar ke pelayanan Kesehatan dan bantuan sosial. Namun pada tahun 2021 pengeluaran pemerintah meningkat disebabkan oleh peningkatan realisasi anggaran pemerintah dan adanya pengeluaran bantuan dari pemerintah ke masyarakat.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi, dari 41,20 persen pada tahun 2017, hingga mencapai 38,94 persen pada tahun 2021. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2021, dan proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 42,42 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRBatas dasar harga konstan (ADHK 2010)

diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan adanya fluktuasi, hal yang sama juga terjadi pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2017 konsumsi pemerintah per kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 8.722 ribu rupiah, terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 10.045 ribu rupiah, dan kemudian turun menjadi 9.630 ribu rupiah pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19, namun kembali meningkat menjadi 9.929 ribu rupiah pada tahun 2021. Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga menunjukkan adanya fluktuasi yang sejalan.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan adanya fluktuasi baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 3,85 persen dan terendah tahun 2020 sebesar -5,58 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2017 - 2021 cenderung fluktuatif dari 4,65 persen pada tahun 2017 menjadi 3,22 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 6,30 persen dan pertumbuhan PMTB terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -5,40 persen. Pertumbuhan negatif di tahun 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19 dimana adanya pembatasan kegiatan yang membuat banyak proyek konstruksi berhenti sementara. Proyek konstruksi yang berhenti pada tahun 2020 akhirnya kembali dilakukan di tahun 2021 sehingga pertumbuhan PMTB positif kembali.

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	578,09	633,93	722,79	724,52	762,30
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	451,14	468,11	497,62	470,77	485,93
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	30,11	30,94	32,74	31,97	31,48
Struktur PMTB ¹⁰					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	498,30	551,37	629,67	633,54	666,23
(%)	86,20	86,98	87,12	87,44	87,40
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	79,79	82,56	93,12	90,98	96,07
(%)	13,80	13,02	12,88	12,56	12,60
Total PMTB					
(Miliar Rp)	578,09	633,93	722,79	724,53	762,30
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
a. Bangunan	5,64	4,62	6,19	-5,51	3,10
b. Non Bangunan	0,54	-0,57	6,92	-4,82	3,82
Total PMTB	4,76	3,76	6,30	-5,40	3,22

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar-daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

¹⁰Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹¹Diturunkan dari perhitungan PDRBatas dasar harga konstan (ADHK 2010)

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	0,97	0,91	0,95	1,02	1,07
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	0,80	0,75	0,76	0,80	0,83
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2017 perubahan inventori Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 0,97 miliar rupiah, yang kemudian terus berfluktuasi hingga mencapai 1,07 miliar rupiah pada tahun 2021.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami penurunan yang tidak signifikan pada periode 2017-2021. Proporsi perubahan inventori menurun dari 0,05 persen pada tahun 2017 menjadi 0,04 persen pada tahun 2021. Proporsi perubahan inventori tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 – 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	295,58	322,82	361,88	440,75	492,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	301,44	315,81	336,85	401,77	419,61
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	15,40	15,76	16,39	19,45	20,36
Pertumbuhan ¹²	5,49	4,77	6,66	19,27	4,44

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2017-2021 nilai ekspor barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 295,58 miliar rupiah hingga mencapai 492,99 miliar rupiah pada tahun 2021. Sejalan dengan nilai ekspor Atas Dasar Harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 301,44 miliar rupiah pada tahun 2017 hingga 419,61 miliar rupiah pada tahun 2021. Sementara itu, pada periode 2017 s.d 2021, proporsi dalam PDRB juga meningkat dari 15,40 persen pada tahun 2017 menjadi 20,36 persen di tahun 2021.

Pertumbuhan riil total ekspor berfluktuasi pada 5 tahun terakhir di mana pertumbuhan total ekspor pada tahun 2017 sebesar 5,49 persen menjadi 4,44 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan total ekspor tertinggi ada pada tahun 2020 sebesar 19,27 persen. Tingginya pertumbuhan komponen ekspor pada tahun 2020 dipengaruhi oleh adanya industri pengolahan ikan yang baru beroperasi pada tahun 2020, di mana produknya diekspor menggunakan tol laut.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

¹²Diturunkan dari perhitungan PDRBADHK 2010

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kepulauan Talaud di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada Tabel 16 di bawah ini menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud meningkat (baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010) pada kurun tahun 2017 s.d 2021. Pada tahun 2017 nilai impor barang dan jasa Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 1.084,62 miliar rupiah, kemudian meningkat hingga 1.433,34 miliar rupiah pada tahun 2021. Jika ditinjau dari proporsinya terhadap PDRB, impor barang dan jasa mengalami fluktuasi di mana sebesar 56,50 persen di tahun 2017 meningkat hingga 61,34 persen di tahun 2019, namun kemudian menurun hingga 59,18 di tahun 2021.

**Tabel 16. Perkembangan Impor
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.084,62	1.222,22	1.354,19	1.377,72	1.433,34
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	877,64	913,40	965,15	980,00	1.008,49
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	56,50	59,65	61,34	60,78	59,18
Pertumbuhan ¹³	4,66	4,07	5,67	1,54	2,91

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRBADHK 2010

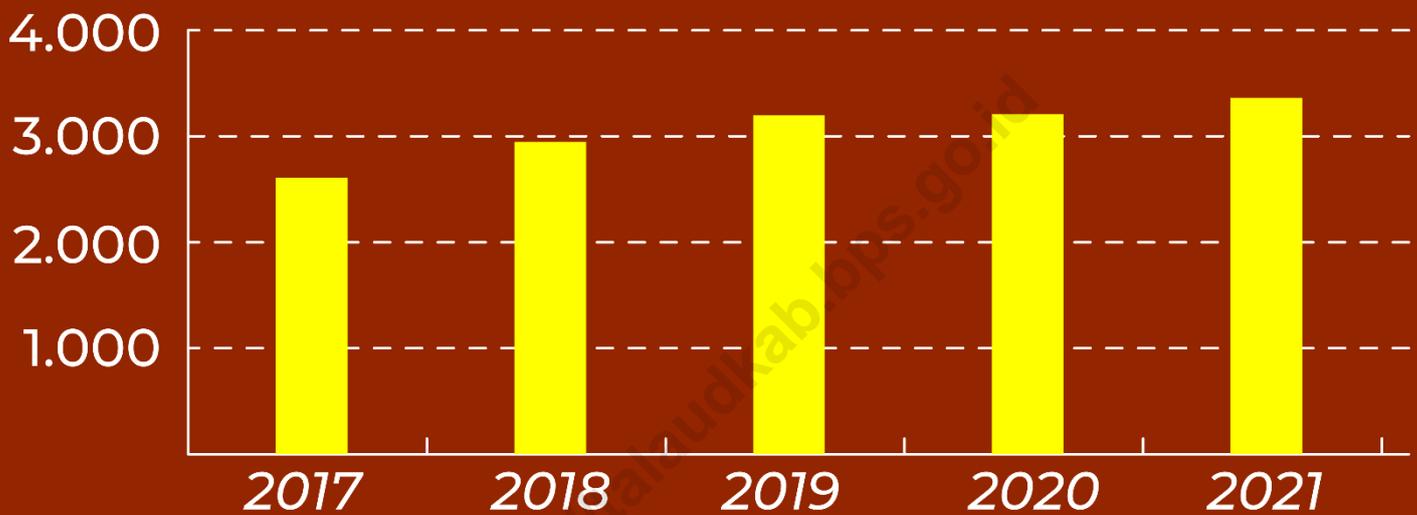
<https://talaudkab.bps.go.id>

PERKEMBANGAN AGREGAT

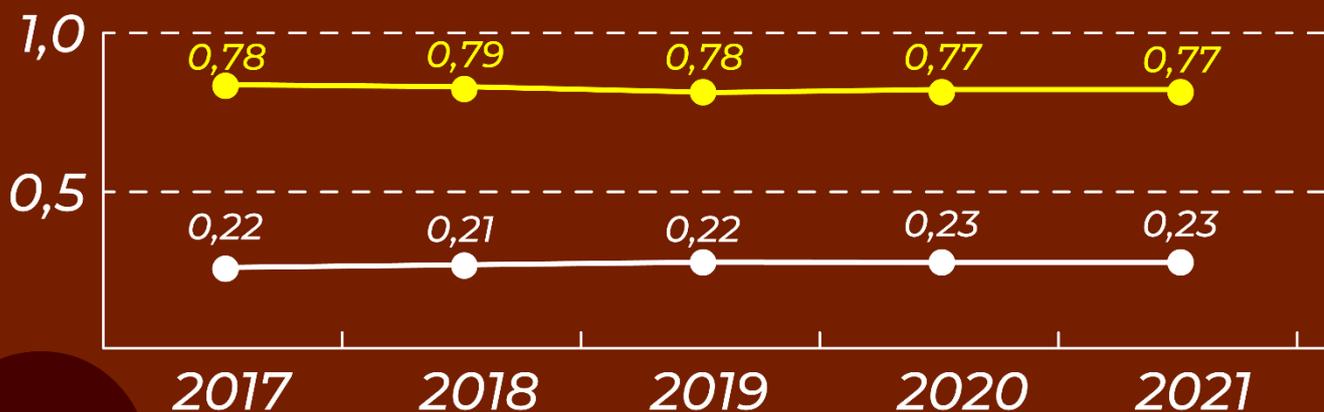


04

Pendapatan Disposabel, 201U-2021 (Miliar Rupiah)



Perbandingan APC dan APS, 2017-2021



"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap output dengan menggunakan investasi tersebut

<https://talaudkab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	1.919,78	2.048,96	2.207,73	2.266,56	2.421,88
- ADHK 2010	1.459,64	1.532,89	1.604,81	1.611,74	1.665,60
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	21.171	22.369	23.874	23.979	25.498
- ADHK 2010	16.097	16.735	17.354	17.052	17.536
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	4,13	3,96	3,70	-1,74	2,84
Jumlah penduduk (org)	90.678	91.599	92.475	94.521	94.983

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
<i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	1.302,53	1.404,62	1.502,69	1.525,27	1.610,15
b. LNPRT	36,31	39,71	44,73	42,47	45,65
c. Pemerintah	790,92	869,18	928,88	910,25	943,05
Jumlah	2.129,76	2.313,51	2.476,30	2.477,99	2.598,85
PDRB (ADHB)					
<i>(Miliar Rp)</i>					
	1.919,78	2.048,96	2.207,73	2.266,56	2.421,88

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d} \quad APC = \frac{xC}{Y_d}$$

Dimana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel. Perlu diketahui pula bahwa $APC + APS = 1$

Tabel 19. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save
Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel (Ya) (Miliar Rp)	2.708,82	2.948,36	3.200,04	3.203,53	3.362,22
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	1.302,53	1.404,62	1.502,69	1.525,25	1.610,15
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) (Miliar Rp)	36,31	39,71	44,73	42,47	45,65
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	790,92	869,18	928,88	910,25	943,05
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	2.129,76	2.313,51	2.476,30	2.477,99	2.598,85
APC	0,79	0,78	0,77	0,77	0,77
Tabungan (Miliar Rp)	579,06	634,85	723,74	725,54	763,37
APS	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Kemudian output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Dimana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

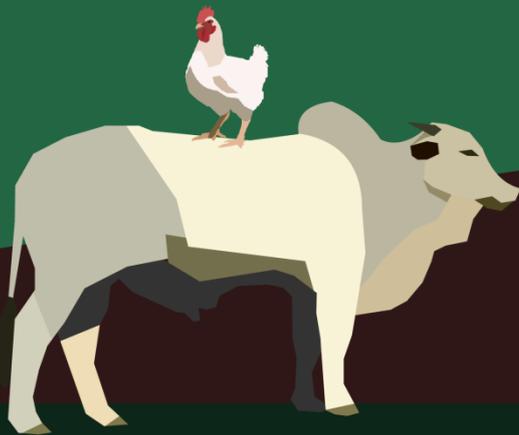
Tabel 20. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1.459,64	1.532,89	1.604,81	1.611,74	1.665,60
Perubahan (miliar rupiah)	70,89	73,25	71,92	6,91	53,86
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	451,14	468,11	497,62	470,77	485,93
ICOR	6,36	6,39	6,92	68,13	9,02

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PENUTUP 05



Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi



Pengeluaran Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya adalah subkomponen terbesar kedua pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

<https://talaudkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2017-2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan. Di Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi pelaku ekonomi paling dominan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Perilaku konsumsi tercermin pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit, dan konsumsi pemerintah. Untuk perilaku investasi tercermin pada komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sedangkan perilaku perdagangan tercermin pada komponen pengeluaran ekspor dan impor.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017-2021 sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021 ADHB mencapai 2.421,88 miliar rupiah, sementara ADHK sebesar 1.665,60 miliar rupiah. Komponen yang memiliki peranan paling besar adalah konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,48 persen. Sedangkan peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran didekati oleh proporsi PMTB yang mencapai 31,48 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2021 sebesar 3,34 persen.
5. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.
6. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap ekonomi luar daerah. Melihat komponen impor yang lebih besar dari ekspor, menggambarkan besarnya ketergantungan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud pada pasokan barang dan jasa dari luar daerah.

<https://talaudkab.bps.go.id>



Lampiran

<https://lampkab.bps.go.id>

<https://talaudkab.bps.go.id>

Lampiran 1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.302.531	1.404.620	1.502.689	1.525.270	1.610.151
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	675.971	726.763	782.808	824.368	867.861
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.924	4.044	4.555	4.346	5.498
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	167.362	185.057	198.193	205.327	213.297
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	39.913	42.455	46.207	53.678	59.743
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	337.307	362.223	380.570	348.403	367.073
1.f. Hotel dan Restoran	44.283	45.993	49.823	48.181	51.595
1.g. Lainnya	33.772	38.085	40.533	40.967	45.084
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	36.313	39.715	44.728	42.466	45.651
3. Konsumsi Pemerintah	790.921	869.183	928.884	910.249	943.052
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	578.088	633.930	722.788	724.526	762.298
4.a. Bangunan	498.302	551.368	629.668	633.542	666.231
4.b. Non-Bangunan	79.787	82.562	93.121	90.983	96.067
5. Perubahan Inventori	967	907	951	1.020	1.071
6. Ekspor	295.578	322.823	361.882	440.755	492.994
7. Impor	1.084.615	1.222.216	1.354.193	1.377.723	1.433.340
PDRB	1.919.783	2.048.963	2.207.730	2.266.564	2.421.877

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Lampiran 2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	977.330	1.025.350	1.072.834	1.078.598	1.117.832
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	485.568	505.129	527.310	547.948	566.160
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3.096	3.251	3.425	3.285	3.827
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	124.135	134.003	142.982	142.893	147.725
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	30.239	31.372	32.752	35.906	38.670
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	269.270	283.657	296.374	279.983	288.788
1.f. Hotel dan Restoran	36.451	37.123	38.331	37.406	39.308
1.g. Lainnya	28.571	30.815	31.661	31.158	33.354
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	27.616	28.905	30.978	30.945	32.957
3. Konsumsi Pemerintah	578.949	607.359	630.903	608.859	616.933
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	451.142	468.108	497.620	470.767	485.927
4.a. Bangunan	376.079	393.471	417.820	394.815	407.074
4.b. Non-Bangunan	75.063	74.637	79.801	75.952	78.854
5. Perubahan Inventori	799	747	765	803	827
6. Ekspor	301.436	315.815	336.855	401.768	419.609
7. Impor	877.635	913.396	965.147	979.999	1.008.486
PDRB	1.459.636	1.532.887	1.604.808	1.611.742	1.665.598

Keterangan : *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Lampiran 3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017 - 2021

Komponen Pengeluaran	(%)				
	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	67,85	68,55	68,06	67,29	66,48
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	35,21	35,47	35,46	36,37	35,83
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,20	0,20	0,21	0,19	0,23
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,72	9,03	8,98	9,06	8,81
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,08	2,07	2,09	2,37	2,47
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	17,57	17,68	17,24	15,37	15,16
1.f. Hotel dan Restoran	2,31	2,24	2,26	2,13	2,13
1.g. Lainnya	1,76	1,86	1,84	1,81	1,86
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,89	1,94	2,03	1,87	1,88
3. Konsumsi Pemerintah	41,20	42,42	42,07	40,16	38,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	30,11	30,94	32,74	31,97	31,48
4.a. Bangunan	25,96	26,91	28,52	27,95	27,51
4.b. Non-Bangunan	4,16	4,03	4,22	4,01	3,97
5. Perubahan Inventori	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
6. Ekspor	15,40	15,76	16,39	19,45	20,36
7. Impor	56,50	59,65	61,34	60,78	59,18
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

	(%)				
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,11	4,91	4,63	0,54	3,64
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,84	4,03	4,39	3,92	3,32
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,20	4,99	5,35	-4,08	16,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,00	7,95	6,70	-0,06	3,38
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,61	3,75	4,40	9,63	7,70
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,04	5,34	4,48	-5,53	3,14
1.f. Hotel dan Restoran	3,22	1,84	3,25	-2,41	5,08
1.g. Lainnya	7,28	7,86	2,74	-1,59	7,05
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	3,11	4,67	7,17	-0,10	6,50
3. Konsumsi Pemerintah	4,65	4,91	3,88	-3,49	1,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,76	3,76	6,30	-5,40	3,22
4.a. Bangunan	5,64	4,62	6,19	-5,51	3,10
4.b. Non-Bangunan	0,54	-0,57	6,92	-4,82	3,82
5. Perubahan Inventori	-26,58	-6,52	2,44	4,99	3,00
6. Ekspor	5,49	4,77	6,66	19,27	4,44
7. Impor	4,66	4,07	5,67	1,54	2,91
PDRB	5,10	5,02	4,69	0,43	3,34

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 5
Indeks Implisit Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Talaud, 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	133,27	136,99	140,07	141,41	144,04
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	139,21	143,88	148,45	150,44	153,29
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	126,74	124,43	133,01	132,32	143,67
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	134,82	138,10	138,61	143,69	144,39
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	131,99	135,33	141,08	149,50	154,50
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	125,27	127,70	128,41	124,44	127,11
1.f. Hotel dan Restoran	121,48	123,89	129,98	128,81	131,26
1.g. Lainnya	118,21	123,59	128,02	131,48	135,17
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	131,49	137,40	144,39	137,23	138,52
3. Konsumsi Pemerintah	136,61	143,11	147,23	149,50	152,86
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	128,14	135,42	145,25	153,90	156,87
4.a. Bangunan	132,50	140,13	150,70	160,47	163,66
4.b. Non-Bangunan	106,29	110,62	116,69	119,79	121,83
5. Perubahan Inventori	121,10	121,53	124,34	127,02	129,49
6. Ekspor	98,06	102,22	107,43	109,70	117,49
7. Impor	123,58	133,81	140,31	140,58	142,13
PDRB	131,52	133,67	137,57	140,63	145,41

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

<https://talaudkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Kompleks Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane, 95885

Email: bps7104@bps.go.id

website : talaudkab.bps.go.id